

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI DADAPAYAM 02 KABUPATEN SEMARANG

Inayah¹, Titik Haryati²
inayahkusmanto@gmail.com¹
Universitas PGRI Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Dadapayam 02, Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu pendidikan di SD Negeri Dadapayam 02 masuk kategori cukup dan komite sekolah sudah menjalankan beberapa perannya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan mediator dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Dadapayam 02. Akan tetapi, masih ada beberapa indikator kinerja yang belum dilaksanakan secara optimal, yaitu terkait penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah, pelaksanaan proses pembelajaran, pengadaan buku siswa, pemantauan alokasi anggaran, partisipasi stakeholder, dan menampung aspirasi masyarakat. Optimalisasi peran komite sekolah di bidang-bidang tersebut perlu ditingkatkan untuk mencapai mutu pendidikan yang lebih baik di SD Negeri Dadapayam 02.

Kata kunci: Peran Komite Sekolah, Mutu Pendidikan

ABSTRACT

This research aims to describe the role of the school committee in improving the quality of education at SD Negeri Dadapayam 02, Semarang Regency. The study adopts a qualitative descriptive approach. The results indicate that the quality of education at SD Negeri Dadapayam 02 is rated as moderate, and the school committee has fulfilled several roles as an advisory, supporting, controlling, and mediating body in enhancing the quality of education at the school. However, there are still several performance indicators that have not been optimally implemented, namely related to the formulation of the school's vision, mission, and objectives, the implementation of the teaching and learning process, procurement of student books, budget allocation monitoring, stakeholder participation, and community aspirations. Enhancing the optimization of the school committee's roles in these areas is necessary to achieve better educational quality at SD Negeri Dadapayam 02.

Keywords: School Committee Role, Educational Quality

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah proses pelatihan dan pengajaran, terutama untuk anak-anak dan remaja, baik di sekolah maupun di kampus, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan[1].

Salah satu permasalahan dalam pendidikan adalah terkait mutu pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, "Mutu pendidikan merupakan kegiatan yang sistemik dan terpadu dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa." Kecerdasan bangsa dapat dicapai melalui pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembentukan individu yang mampu bersaing di tingkat global.

Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terencana,

terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia memegang peran penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena kualitas pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Peningkatan kualitas pendidikan adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan berarti bahwa lulusan memiliki kemampuan yang sesuai, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan. Mutu pendidikan sering diartikan sebagai karakteristik layanan pendidikan yang memenuhi kriteria tertentu untuk memuaskan pengguna pendidikan, yaitu peserta didik, orang tua, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan melatarbelakangi pembentukan komite sekolah sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi yang ada. Komite sekolah berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan[2]. Untuk menjalankan fungsi ini, komite sekolah memiliki empat tugas utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai langkah-langkah pencapaian. Tugas-tugas tersebut meliputi: (1) memberikan masukan dalam penentuan kebijakan; (2) mengumpulkan dana; (3) mengawasi layanan pendidikan; dan (4) menanggapi aspirasi masyarakat.

Pengelolaan komite sekolah, sebagaimana dinyatakan oleh Majir, bahwa dalam menghadapi globalisasi pendidikan, diperlukan langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk memastikan terbentuknya generasi yang kompeten sesuai dengan tuntutan pembangunan. Masyarakat, sekolah, dan pemerintah perlu bekerja sama tanpa batasan ruang dan waktu. Hubungan antara sekolah dan masyarakat, menurut Majir adalah penting untuk mengembangkan komunikasi yang baik, yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat serta menerima ide dan ajakan, serta berusaha untuk menyukkseskannya. Belajar bagaimana menciptakan komunikasi yang efektif antara sekolah dan komite sekolah adalah kunci untuk meningkatkan kesadaran setiap komunitas atau tanggung jawab sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai hasil yang diinginkan[3].

Berdasarkan penjelasan pola hubungan tripusat pendidikan, kehadiran komite sekolah diharapkan dapat memperbaiki pola hubungan di masa depan. Menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang acuan Pembentukan Komite Sekolah, "komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah." Komite sekolah, dalam pengertian ini, dapat menjadi wadah peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, komite sekolah memiliki peran sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator[4].

Kualitas pendidikan di sekolah cenderung tidak akan meningkat tanpa penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu adalah strategi sistematis, terpadu, dan berjangka panjang untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar dan pedoman mutu yang telah ditetapkan. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, serta standar pembiayaan semuanya merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan (SNP)[5].

Kepala sekolah SD Negeri Dadapayam 02 mengakui bahwa pemanfaatan peran komite sekolah belum maksimal. Selain itu, partisipasi dari wali murid juga masih belum optimal. Dari keempat peran yang dimiliki, komite sekolah di SD Negeri Dadapayam 02 belum dapat melaksanakan semuanya secara keseluruhan. Komite sekolah selama ini

cenderung hanya menjalankan peran sebagai mediator dan pemberi pertimbangan, yang dilaksanakan dalam kegiatan rapat dan pertemuan dengan wali murid. Namun, kegiatan tersebut hanya dilakukan pada waktu tertentu dan tidak dilaksanakan secara rutin. Padahal, peran komite sekolah tidak hanya sebatas mediator dan pemberi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Intensitas kedatangan pengurus komite sekolah untuk melihat dan mengontrol pelaksanaan berbagai program sekolah juga masih tergolong rendah, menunjukkan bahwa komite sekolah di SD Negeri Dadapayam 02 belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai pengontrol.

Tingkat keaktifan dan keefektifan pengurus komite sekolah di SD Negeri Dadapayam 02 juga masih rendah. Komite sekolah cenderung bersikap pasif dan menunggu informasi dari pihak sekolah terkait program dan permasalahan yang ada. Selain itu, rendahnya intensitas kedatangan pengurus komite sekolah menyebabkan hubungan antara pengurus komite sekolah dengan masyarakat di lingkungan sekolah terbatas, yang mengakibatkan proses sosialisasi berbagai program sekolah belum berjalan efektif. Aspirasi dari masyarakat di sekitar sekolah juga belum dapat terserap secara menyeluruh, sehingga peran serta masyarakat dalam usaha penyelenggaraan pendidikan masih rendah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Dadapayam 02, Kabupaten Semarang.

Dalam penelitian ini, sebuah permasalahan telah dirumuskan, yaitu bagaimana peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Dadapayam 02 Kabupaten Semarang. Dari rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan penelitian yaitu untuk memahami bagaimana peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Dadapayam 02 Kabupaten Semarang.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Komite Sekolah

Komite Sekolah, sebagai pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), umumnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, fokusnya lebih pada meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mencapai mutu pendidikan. Sesuai dengan UU Sisdiknas, komite sekolah merupakan badan mandiri yang mengakomodasi partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu, kesetaraan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di berbagai jenis pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah[6].

Pengertian komite sekolah menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044 Tahun 2002 dalam lampiran II adalah Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di unit-unit pendidikan, termasuk sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Pembentukan Komite Sekolah, yang diatur oleh Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002, bertujuan untuk meningkatkan mutu dalam program pembinaan pendidikan dasar dan menengah dengan memperkenalkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat di setiap unit pendidikan[4].

Tujuan utama dibentuknya Komite Sekolah sebagai organisasi masyarakat sekolah adalah:

- a. Menyediakan wadah bagi aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam merumuskan kebijakan operasional dan program pendidikan di unit pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di unit pendidikan.
- c. Menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di unit pendidikan.

Dari kutipan di atas, keberadaan Komite Sekolah diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Peningkatan partisipasi dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan terbuka dan demokratis di mana semua pihak di sekolah (karyawan, staf, guru, siswa) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, usahawan, dll.) dapat terlibat langsung dalam proses pendidikan.

Adapun fungsi Komite Sekolah menurut UU Sisdiknas meliputi[6]:

- a. Mendorong minat dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- b. Mengadakan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- c. Mengumpulkan dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: 1) kebijakan dan program pendidikan, 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan, 4) Kriteria tenaga kependidikan, 5) Kriteria fasilitas pendidikan, dan 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan hasil pendidikan di satuan pendidikan.

Anggota komite sekolah terdiri dari orang tua siswa, guru, siswa, masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, dan pemerintah setempat. Keberadaan komite sekolah di sebuah unit pendidikan akan menjadi mitra kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu, kualitas, efisiensi, dan relevansi pengelolaan pendidikan.

2. Peran Komite Sekolah

Saat ini, pendidikan dianggap sebagai tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Namun, implementasinya sering kali masih terbatas pada tingkat slogan dan belum mencapai harapan yang sebenarnya. Peran serta stakeholder, terutama masyarakat, belum sepenuhnya optimal dan masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Di dalam UU Sisdiknas disebutkan[6]:

- a. Peran serta masyarakat dalam pendidikan mencakup partisipasi individu, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengawasan terhadap mutu pelayanan pendidikan.
- b. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber daya, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Komite sekolah berfungsi sebagai badan yang menghubungkan sekolah dengan masyarakat. Pembentukannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propena), yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Rapeta), yang menyatakan adanya pembentukan Dewan Pendidikan Sekolah (school board) di setiap kabupaten dan kota, serta pembentukan komite sekolah di setiap sekolah.

Peran yang dimiliki oleh komite sekolah dalam dunia pendidikan mencakup: (1) pemberi pertimbangan (advisory agency), (2) pendukung (supporting agency), (3) pengontrol (controlling agency), dan (4) mediator[7]. Melalui keempat peran ini, diharapkan komite sekolah dapat mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat dan

meningkatkan partisipasi mereka dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan.

3. Hubungan Sekolah dengan Komite (Masyarakat)

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat; sekolah adalah institusi yang beroperasi dalam konteks sosial, dengan siswa yang berasal dari masyarakat. Keberadaan sekolah sangat bergantung pada dukungan sosial dan finansial dari masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Kindred Leslie dalam Piet, hubungan antara sekolah dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota masyarakat tentang kebutuhan dan praktik pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama mereka dalam upaya memperbaiki sekolah. Hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat, yang difasilitasi oleh organisasi komite sekolah, diharapkan dapat mengoptimalkan peran serta orang tua murid dan masyarakat dalam memajukan program Pendidikan[8].

Sementara itu, Wahjosumijo berpendapat bahwa tujuan utama dari pengembangan hubungan yang efektif dengan masyarakat yaitu untuk memungkinkan orang tua dan warga setempat berpartisipasi secara aktif dan bermakna dalam kegiatan sekolah. Pandangan ini menekankan pentingnya komunikasi antara sekolah dan masyarakat[9].

Seperti yang dikatakan oleh Kindred Leslie dalam Mulyono, hubungan antara sekolah dan masyarakat merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota masyarakat tentang kebutuhan praktik pendidikan dan mendorong minat serta kerjasama mereka dalam memperbaiki sekolah[10].

Menurut Sagala, hal ini dapat mengoptimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan serta menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Komunikasi yang baik diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat, yang difasilitasi oleh komite sekolah yang bersinergi[11].

4. Mutu Pendidikan

Mutu berkaitan erat dengan penilaian seseorang terhadap sebuah produk barang atau jasa. Barang yang bermutu pasti memiliki manfaat lebih bagi pengguna dan sesuai dengan kebutuhan atau harapan mereka. Sementara itu, jasa yang bermutu adalah pelayanan yang diberikan oleh seseorang atau organisasi yang sangat memuaskan. Mutu adalah salah satu tujuan utama bagi organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang perdagangan atau jasa, karena mutu dapat menjadi tolok ukur keberhasilan. Namun, pandangan setiap orang terhadap mutu bisa berbeda karena sifatnya yang relatif, tergantung pada perspektif atau pemikiran individu dan dapat berubah-ubah.

Mutu dalam pendidikan dapat dilihat dari segi relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan lulusan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan yang baik, serta kemampuan seseorang dalam mengatasi persoalan hidup. Mutu pendidikan dapat diukur dari manfaat pendidikan bagi individu, masyarakat, dan negara. Secara khusus, mutu pendidikan juga dapat dilihat dari tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang ingin dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Pada proses pendidikan, mutu berkaitan dengan bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana, tenaga pengajar, pembiayaan, lingkungan, dan sebagainya. Sedangkan pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang dicapai sekolah dalam kurun waktu tertentu, baik dalam tes kemampuan akademik seperti ulangan umum, raport, ujian nasional, maupun prestasi non-akademik seperti di bidang olahraga, seni, atau keterampilan[12].

Mutu dalam pendidikan juga mencakup masukan, proses, keluaran, dan dampaknya:

- a. Mutu masukan: dapat dilihat dari kondisi sumber daya manusia seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf, dan siswa; kriteria masukan material seperti alat peraga, buku, kurikulum, sarana prasarana; serta perangkat lunak pendidikan seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Selain itu, mutu masukan juga mencakup harapan seperti visi, misi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.
- b. Mutu proses: meliputi kemampuan sumber daya sekolah dalam mentransformasikan berbagai jenis masukan dan situasi untuk mencapai nilai tambah tertentu bagi siswa, seperti kesehatan, kedisiplinan, kepuasan, dan keakraban.
- c. Mutu keluaran: dipandang bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik (nilai) dan ekstrakurikuler (aneka jenis keterampilan) pada siswa yang lulus dari satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu[13].

Dengan demikian, mutu pendidikan mencakup seluruh aspek dari masukan hingga keluaran dan dampaknya pada individu dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena atau keadaan yang terjadi. Sugiyono menjelaskan bahwa metode ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau masalah penelitian dari perspektif partisipan atau individu yang terlibat langsung dalam konteks yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang kaya dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti, yang sering kali tidak dapat dicapai melalui pendekatan kuantitatif[14].

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Melalui metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Dadapayam 02 Kabupaten Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komite sekolah di SD Negeri Dadapayam 02 telah melaksanakan perannya sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam berbagai aspek, antara lain: (1) memberikan pertimbangan dan mengesahkan program sekolah; (2) memberi pertimbangan dan mengesahkan RAPBS; (3) memberikan masukan terkait perekrutan tenaga pendidik; dan (4) memberi pertimbangan mengenai sarana dan prasarana sekolah. Meskipun beberapa indikator kinerja komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan telah terlaksana, ada beberapa yang belum terlaksana, seperti: (1) memberikan pertimbangan dalam peningkatan proses pembelajaran dan pengajaran; (2) memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan di sekolah; (3) memberikan pertimbangan dalam penyusunan visi, misi, tujuan, dan kebijakan sekolah; (4) memberikan pertimbangan terhadap proses pembelajaran dan pengajaran kepada guru; dan (5) memberikan pertimbangan dalam pengadaan buku bagi siswa.

Terkait peran komite sekolah sebagai pendukung (supporting agency), aktivitas yang mencakup bidang hubungan dengan wali murid dan usaha peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) menciptakan hubungan dengan orang tua siswa; (2) mengonsep subsidi silang dalam penarikan iuran orang tua siswa; (3) mengadakan pertemuan dengan wali murid; (4) memberikan motivasi kepada orang tua siswa; dan (5) mendukung usaha peningkatan mutu. Namun, ada indikator kinerja yang belum terlaksana, yaitu memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah, di mana komite sekolah sejauh ini hanya melihat laporan

akhir tahun yang dibuat oleh pihak sekolah.

Dalam peran sebagai pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah SD Negeri Dadapayam 02 melakukan beberapa aktivitas, termasuk: (1) mengawasi kualitas program sekolah; (2) memantau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah; (3) mengawasi hasil ujian; dan (4) memantau anggaran sekolah. Meski beberapa indikator kinerja sebagai pengontrol telah terlaksana, ada beberapa yang belum terlaksana, yaitu: (1) mengawasi penjadwalan program; (2) mengawasi alokasi dana untuk setiap program; (3) mengawasi partisipasi stakeholder; dan (4) mengawasi angka partisipasi sekolah.

Sebagai mediator, komite sekolah SD Negeri Dadapayam 02 melaksanakan beberapa aktivitas, termasuk: (1) mensosialisasikan program dan kebijakan sekolah kepada masyarakat; dan (2) membantu sekolah menciptakan hubungan dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Ada beberapa indikator kinerja sebagai mediator yang belum terlaksana, yaitu: (1) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan dari masyarakat; dan (2) mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin dengan kepala sekolah dan dewan guru.

Keberadaan komite sekolah sering kali dipertanyakan apakah berperan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan pemerintah atau hanya sekadar sebagai penyumbang materi, bahkan ada yang hanya sebagai simbol untuk memenuhi kelengkapan struktural penyelenggaraan sekolah. Komite sekolah adalah badan yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan hierarkis dengan sekolah maupun lembaga pemerintah lainnya. Komite sekolah di SD Negeri Dadapayam 02 berusaha menciptakan suasana yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mutu SD Negeri Dadapayam 02 secara umum termasuk kategori cukup baik. Namun, selama ini komite sekolah di SD Negeri Dadapayam 02 belum memiliki pemetaan program kerja yang jelas. Indikator kinerja yang ada dan dilaksanakan oleh komite sekolah merupakan hasil koordinasi antara sekolah dan komite sekolah. Pelaksanaan peran komite sekolah di SD Negeri Dadapayam 02 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), komite sekolah belum berperan secara optimal dalam memberikan masukan terkait peningkatan proses pembelajaran, proses pengelolaan pendidikan di sekolah, penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan kegiatan sekolah, serta pengadaan buku untuk siswa. Peran yang telah dilaksanakan meliputi pemberian pertimbangan dalam penyusunan program sekolah, penyusunan RAPBS, pelaksanaan perekrutan tenaga pendidik, dan perihal sarana/prasarana di sekolah.
2. Sebagai pendukung (*supporting agency*), komite sekolah belum berperan secara optimal dalam pemantauan kondisi anggaran sekolah. Peran yang telah dilaksanakan meliputi penciptaan hubungan dengan orang tua siswa, pelaksanaan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran orang tua siswa, pengadaan pertemuan dengan wali murid, pemberian motivasi kepada orang tua siswa, dan dukungan usaha peningkatan mutu.
3. Sebagai pengontrol (*controlling agency*), komite sekolah belum berperan secara optimal dalam memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah, partisipasi stakeholder pendidikan, dan angka partisipasi di sekolah. Peran yang telah dilaksanakan meliputi pengawasan kualitas program sekolah, pemantauan sumber

daya yang dimiliki oleh sekolah, pengawasan hasil ujian, dan pemantauan anggaran sekolah.

4. Sebagai mediator, komite sekolah belum berperan secara optimal dalam menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan dari masyarakat, serta pengadaan rapat atau pertemuan secara rutin dengan kepala sekolah dan dewan guru. Peran yang telah dilaksanakan meliputi sosialisasi program dan kebijakan sekolah kepada masyarakat dan bantuan dalam menciptakan hubungan serta kerjasama antara sekolah dan masyarakat.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa meskipun komite sekolah di SD Negeri Dadapayam 02 telah melaksanakan beberapa peran penting, masih terdapat banyak aspek yang perlu ditingkatkan agar komite sekolah dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. "Visi baru manajemen sekolah." (2016).
- Komite, P., Dalam, S., Mutu, M., Di, S., Negeri, S., Muliati, M., & Arifin, Z. (n.d.). A Muliati, Zainal Arifin| 77.
- Majir, A. (n.d.). REKONSTRUKSI HUBUNGAN KOMITE SEKOLAH DAN SEKOLAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN.
- Menteri Pendidikan Nasional. Kepmendiknas Nomor 44/U/2002 Tentang Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Mulyono. 2010. Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan. Jogjakarta: A-Ruzz.
- Pantjastuti, Sri Renani. Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan. Hikayat, 2008.
- Penelitian, P., Pendidikan, K., Kebudayaan, D., Penelitian, B., Pengembangan, D., & Pendidikan, K. (2019). SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.
- Sagala, Syaiful. "Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan." (2013).
- Sahertian, Piet A. "Dimensi Administrasi Pendidikan." Surabaya: Usaha Nasional (1994).
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Alfabeta.
- Indonesian Journal of Education and Administration Review. 2017. June, Volume 1 Number 1
- U.H. Saidah, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahjosuidjo. 2010. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Yusuf, Choirul Fuad. "Budaya Sekolah dan Mutu Pendidikan." Jakarta: PT. Pena Citasatria (2008).